

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. MUI kota Surabaya didirikan pada tanggal 17 Januari 1975 di kota Surabaya, tepatnya di rumah dinas Walikota Surabaya Jl. Sedap Malam 1 Surabaya. Pada awal berdirinya MUI kota Surabaya dipimpin oleh Munawar Jaelani sampai periode tiga. Hal tersebut dikarenakan Munawar Jaelani meninggal di tengah-tengah dia masih menjabat pada tahun 1988-1992.
2. Pada masa perkembangan MUI Surabaya untuk periode I – III dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode I – II (tahun 1975-1985) adalah masa konsolidasi organisasi, penataan organisasi yang mantap dan pembagian tugas serta program yang jelas. Sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh umat khususnya warga kota Surabaya. Sedang pada periode III (tahun 1985-1990) memberikan pengenalan dan memasyarakatkan majelis ulama serta pengembangan organisasi sampai tingkat Kecamatan se-kota Surabaya.
3. Perkembangan program dan pelaksanaan MUI pada periode I sampai III (1975 – 1992), MUI Surabaya telah banyak menyelesaikan sebuah permasalahan umat Islam di antaranya:

- Lewat komisi fatwa dan hukum, mengenai perebutan tempat ibadah atau masjid antara warga NU dan Muhammadiyah tepatnya di Wonorejo 3 Surabaya.
- Masalah pembangunan tempat ibadah atau gereja Pentakosta di Jl. Simorejo Gg. XXI Kelurahan Simomulyo Kecamatan Tandes yang tidak diinginkan oleh umat Islam, karena letaknya berdekatan dengan masjid yang menimbulkan keresahan umat Islam.
- Pemindahan makam, karena terkena proyek pembangunan

B. Saran

Berkenaan dengan materi skripsi ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Penelitian tentang peranan sebuah lembaga merupakan hal yang penting. Selain untuk mengenang dan mementaskan kembali peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, penelitian ini juga merupakan gerak sejarah yang sebenarnya membuat kita lebih mengerti tentang arti sebuah lembaga pada waktu itu yang bisa dijadikan sebagai cerminan maupun keteladanan bagi lembaga maupun umat Islam sekarang pada umumnya.
2. Meskipun kelahiran MUI baik tingkat kota Surabaya, propinsi maupun pusat tidak bisa dilepaskan dari intervensi penguasa (pemerintah), upaya penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi landasan utama dari lembaga ini

hendaknya selalu dijadikan tauladan dan diamalkan oleh seluruh umat Islam demi terciptanya Ukhuwah Islamiyah.

3. Hubungan kerjasama antara pemerintah dan ulama hendaknya terjalin secara sehat dan konstruktif serta tidak saling merugikan satu sama lain.
4. Agar masyarakat tidak salah paham mengenai kinerja MUI, baiknya setiap memutuskan sesuatu, masyarakat diajak tukar pendapat terlebih dahulu, karena umat Islam sendiri terbagi menjadi beberapa golongan.